

# PROSIDING



LOKALATIH SINERGI PENYUSUNAN  
RPJMN 2020-2024 DAN RPJMD  
BIDANG PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN

SEPTEMBER 2018



KOTA MAKASSAR

---

Jika ada pertanyaan lebih lanjut,  
Anda dapat menghubungi

**Sekretariat Pokja PPAS**

Jalan Ki Mangunsarkoro No. 41  
021-21231162  
ccmu.indonesia@gmail.com



SEPTEMBER 2018



# RINGKASAN

## LOKALATIH

Hotel Claro, Jalan AP. Pettarani  
No. 3, Tamamaung,  
Panakkukang-Kota Makassar,  
Sulawesi Selatan

Sebanyak dua puluh enam (26) kabupaten dan kota serta enam (6) provinsi di kawasan Timur Indonesia mengikuti Lokalatih Sinergi Penyusunan RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Bidang Perumahan dan Permukiman. Seluruh daerah yang mengikuti lokalatih merupakan daerah yang baru saja menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan merupakan daerah yang termasuk dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Tiap daerah diwakili oleh tiga orang yang berasal dari Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Lokalatih dilakukan pada tanggal 12-14 September 2018 di Makassar, Sulawesi Selatan. Acara diselenggarakan oleh Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), bekerja sama dengan Direktorat Perkotaan, Permukiman, dan Perumahan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, dan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) II, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Selama tiga hari, para peserta berdiskusi dan mendapatkan wawasan bidang perumahan dan permukiman melalui berbagai sesi termasuk diantaranya sesi high-level discussion, paparan, talkshow, serta dilatih dalam menyusun Kerangka Kerja Logis (KKL) sebagai instrumen pendukung dalam proses perencanaan secara umum terutama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di daerah masing-masing.

Tri Dewi Virgiyanti, Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas, dalam paparan pembukaannya menyatakan bahwa bertempat tinggal dalam hunian dan lingkungan yang sehat dan layak merupakan hak konstitusi warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28(h). Penyediaan perumahan bagi masyarakat berpendapatan menengah ke atas telah sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Pemerintah hanya berperan sebagai regulator agar pelaksanaannya tidak memberikan dampak negatif baik terhadap lingkungan hidup maupun kehidupan sosial masyarakat umumnya. Hal ini tentunya tidak berlaku untuk masyarakat berpendapatan rendah karena mereka masih menghadapi banyak kesulitan untuk menyediakan rumahnya sendiri maupun mengakses pasar perumahan apabila tanpa disertai fasilitasi pemerintah. Penanganan permukiman kumuh baik yang legal maupun ilegal merupakan salah satu langkah penting dalam program pengentasan kemiskinan. Rumah merupakan tempat persemiaan budaya dan pembentukan karakter manusia. Kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang sehat dan layak terkait erat dengan kesehatan masyarakat dan merupakan prasyarat terbentuknya sumber daya manusia yang sehat lahir dan batin. Kemudian, dalam serangkaian sesi berikutnya, narasumber dari Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, BPS, Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta BPS memberikan pemahaman kepada peserta terkait dengan arah kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman, isu strategis bidang perumahan dan permukiman, poin penting kolaborasi pusat dan daerah, dan indikator SDGs terkait perumahan dan permukiman.

Pada sesi penyusunan Kerangka Kerja Logis (KKL), peserta diberikan pemahaman tentang konsep KKL, serta melakukan praktek penyusunan KKL dengan dipandu oleh tim fasilitator yang berasal dari tim Central Collaboration Management Unit (CCMU) KOTAKU, tim Advisory KOTAKU, tim konsultan Kemendagri serta fasilitator profesional bidang perumahan dan permukiman. Peserta dipandu dalam menganalisa kondisi, menganalisa isu/masalah, menyusun solusi, dan menyusun hasilnya dalam format KKL.

Lokalatih ditutup oleh Dwityo Akoro Soeranto, Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR, yang memberikan apresiasi kepada seluruh peserta yang mengikuti lokalatih. Beliau kembali menekankan bahwa upaya menciptakan perumahan dan permukiman yang layak huni bagi masyarakat Indonesia tidak mampu dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat saja namun perlu peran aktif dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang salah satunya diwujudkan dalam RPJMD yang tersinergikan dengan RPJMN.

Resume Lokalatih

Glosarium

Hal 1

Hal 2

# 1

## PENDAHULUAN

Hal 4



1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Latar Belakang

Tujuan

Keluaran

Penyelenggaraan

Peserta

Metodologi

Hal 5

Hal 5

Hal 5

Hal 5

Hal 5

Hal 5



# 2

## HARI PERTAMA

Hal 6

2.1

Sambutan Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan

Hal 7

2.2

*High Level Discussion*

Hal 7

# 3

## HARI KEDUA

Hal 12

3.1

Sesi pelatihan I - Pleno Kebijakan Dasar Bersama Mewujudkan Agenda SDGs; Berbagi cerita sukses Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Hal 13

3.3

Sesi Pelatihan III - Pleno Pengenalan Metode Penyusunan KKL

Hal 19

3.2

Sesi Pelatihan II - Pleno Penyusunan Dan Pemanfaatan Data Serta Indikator Dalam Penyelenggaraan PKP

Hal 15

# DAFTAR ISI



## 4

### HARI KETIGA

**Hal 20**

**4.1**

**Presentasi - Hasil Penyusunan KKL  
Pembangunan**

**Hal 21**

**4.2**

**Talkshow dengan Eselon II**

**Kementerian PUPR – Strategi  
Kementerian PUPR dalam  
mendukung SDGs Goal 11**

**Hal 22**

## LAMPIRAN

**Hal 25**

- A. Sambutan Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman
- B. Sambutan Kepala Bappeda
- C. Agenda
- D. Daftar Narasumber
- E. Daftar Fasilitator dan Co-fasilitator
- F. Daftar Peserta
- G. Video
- H. Materi Lokalatih

# GLOSARIUM

---

<b>Singkatan</b>	<b>Definisi</b>
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Backlog	Tingkat kebutuhan hunian
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BBWS	Balai Besar Wilayah Sungai
BLU	Badan Layanan Umum
BSPS	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BPS	Badan Pusat Statistik
CCMU	<i>Central Collaboration Management Unit</i>
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i>
DAK	Dana Alokasi Khusus
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
KKL	Kerangka Kerja Logis
KLB	Koefisien Lantai Bangunan
KLHS	Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KMW	Konsultan Manajemen Wilayah
KOTAKU	Kota Tanpa Kumuh
MBR	Masyarakat Berpendapatan Rendah
MDGs	<i>Millennium Development Goals</i>
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
PHBS	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Pilkada	Pemilihan Kepala Daerah
PKP	Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pokja	Kelompok Kerja
PPAS	Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi
Renstra	Rencana Strategis
RP3KP	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
Rusun	Rumah susun
Rusunami	Rumah susun milik
Rusunawa	Rumah susun sewa
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
SPAL	Sistem Pengolahan Air Limbah
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TAPP	Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif
TNP2K	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
TOD	<i>Transit Oriented Development</i>
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
Turbinwas	Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan



---

# PENDAHULUAN

---

## 1.1 LATAR BELAKANG

Pesatnya laju urbanisasi di Indonesia berimplikasi pada besarnya kebutuhan akan perumahan yang layak dan terjangkau. Sesuai dengan mandat yang tertera pada UUD 1945 Pasal 28 H dan UU 1 Tahun 2011, negara bertanggung jawab atas penyediaan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang layak bagi rakyatnya. Dengan demikian, instrumen kebijakan seperti rencana pembangunan baik dalam tingkat nasional maupun daerah berperan penting dalam menjamin hak warga negara.

Saat ini, Kementerian PPN/Bappenas sedang melaksanakan penyusunan rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 bidang perumahan dan permukiman. Penyusunan dokumen ini memerlukan berbagai masukan dari berbagai pihak, termasuk dari itu adalah pemerintah daerah. Pada saat yang bersamaan, pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota juga sedang dalam proses penyusunan RPJMD baru pasca Pilkada serentak yang tentunya akan menjadi kesempatan yang baik untuk sinergi agenda pembangunan perumahan dan permukiman di tingkat pusat dan daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Kementerian PPN/Bappenas selaku Ketua Kelompok Kerja Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi (Pokja PPAS) Nasional melaksanakan lokalatih Sinergi Penyusunan RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Bidang Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman, untuk menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar dokumen perencanaan jangka menengah di tingkat pusat dengan daerah.

## 1.2 TUJUAN

Tujuan dari Lokalatih Sinergi Penyusunan RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Bidang Perumahan dan Permukiman adalah:

A. Menyelaraskan arah kebijakan, sasaran, indikator, serta kegiatan prioritas pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;

B. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menerapkan kerangka kerja logis pada penyusunan RPJMD bidang perumahan dan kawasan permukiman;

## 1.3 KELUARAN

Target kompetensi yang dicapai oleh peserta setelah mengikuti Lokalatih Sinkronisasi RPJMN 2020-2024 dan RPJMD terkait Bidang Perumahan dan Permukiman adalah:

- Peserta memahami konsep dan konteks perumahan, permukiman, air minum, dan sanitasi
- Peserta memahami isu strategis perumahan dan permukiman di tingkat nasional
- Peserta memahami isu strategis dalam konteks lokal serta mampu menerjemahkan target nasional ke dalam RPJMD
- Peserta memahami cara menyusun Kerangka Kerja Logis

## 1.4 PENYELENGGARAAN

Lokalatih Sinergi RPJMN 2020-2024 dengan RPJMD untuk Wilayah Timur mengambil lokasi di Kota Makassar, Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan lokalatih dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu-Jumat / 12-14 September 2018

Tempat : Hotel Claro, Jalan AP. Pettarani No. 3, Tamamaung, Panakkukang-Kota Makassar, Sulawesi Selatan

## 1.5 PESERTA

Daerah yang hadir dalam lokalatih ini adalah provinsi dan kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan Pilkada 2018 dan merupakan wilayah penerima program KOTAKU. Jumlah provinsi yang hadir adalah sebanyak 6 provinsi, dan untuk kabupaten/kota sebanyak 26 daerah. Jumlah peserta yang hadir pada lokalatih ini sebanyak 102 orang. Peserta merupakan perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tenaga Ahli Perencanaan Perumahan (TAPP) Provinsi, Konsultan Manajemen Wilayah (KMW), dan juga Koordinator Kota KOTAKU.

## 1.6 METODOLOGI

Lokalatih Sinergi RPJMN 2020-2024 dengan RPJMD untuk Wilayah Timur ini dilaksanakan melalui beberapa rangkaian acara dengan tiga metode utama, yaitu dengan *talkshow*, diskusi panel, dan praktik. Ketiga metode ini diharapkan dapat membantu untuk mencapai empat sasaran yang diharapkan pada peserta.



---

# HARI PERTAMA

12 SEPTEMBER 2018

---

## 2.1

## SAMBUTAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Sambutan ini diwakilkan oleh Ir. H. A. M. Arifin Iskandar, Msi selaku Kepala Bidang Infrastruktur, SDA dan Pengembangan Wilayah, dalam sambutan acara Lokalatih Sinergi Penyusunan RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Bidang Perumahan dan Permukiman menyatakan bahwa Sulawesi Selatan memiliki luas wilayah 46.083,94 km persegi meliputi 21 kabupaten dan 3 Kota. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dalam 5 tahun terakhir selalu berada diatas 7%, bahkan ketika provinsi lain mengalami perlambatan ekonomi, Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Dengan adanya kegiatan Sinergi penyusunan RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Bidang Perumahan dan Permukiman diharapkan mampu menyelesaikan masalah pembangunan perumahan tersebut yang dapat menciptakan penyelarasan arah kebijakan, sasaran, indikator kinerja, serta prioritas pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Dengan adanya sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah maka diharapkan :

1) Mengurangi kesenjangan antar wilayah secara lebih terarah dan sistematis dengan skenario yang disepakati dengan semua pihak, 2) Meningkatkan keterkaitan pembangunan antar wilayah dalam rangka memperkuat perekonomian sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman maka melalui kegiatan lokalatih yang dilaksanakan selama empat hari kedepan diharapkan bisa melahirkan sebuah dokumen perencanaan RPJMN yang lebih berkualitas. Dokumen tersebut diharapkan dapat menciptakan penyelarasan arah kebijakan, sasaran, indikator, serta kegiatan prioritas pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan lokasi dan target yang jelas, tidak seperti RPJMN dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian sebelumnya yang hanya mencantumkan target dan Anggaran tanpa lokasi yang jelas.

## 2.2

## HIGH LEVEL DISCUSSION

*High-level discussion* pada acara Lokalatih ini adalah sesi diskusi yang diadakan antara Eselon II Pokja PPAS Nasional dengan Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang bertujuan untuk menyelaraskan arah kebijakan, sasaran, indikator, serta kegiatan prioritas pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, serta meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menerapkan kerangka kerja logis pada penyusunan RPJMD bidang perumahan dan kawasan permukiman. Diskusi ini dilaksanakan dengan metode dialog terbuka yang diawali dengan *talkshow* antar Kementerian dan Lembaga, yang dilanjutkan dengan sesi di mana Kepala OPD dapat menyampaikan langsung mengenai isu dan tantangan pembangunan perumahan dan permukiman yang ada di daerahnya masing-masing yang direspon dengan tanggapan dari pejabat terkait.

*High-level discussion* dimoderatori oleh Ir. Dedy Permadi CES, dengan narasumber Tri Dewi Virgiyanti, ST, MEM sebagai Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas, Nitta Rosalin, SE, MA sebagai Kasubdit Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dit. SUPD II, Kemendagri, Ir. Pangihutan Marpaung sebagai Fungsional Perencana Utama, Kementerian PUPR, Ir. Doni Janarto Widiyanto, M. Eng.Sc sebagai Direktur Konsolidasi Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan Dendy Kurniadi, ST., MT., sebagai Kepala Seksi Perkotaan Wilayah 2, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR.

Sesi ini dimulai dengan monolog pembuka oleh moderator yang mengangkat isu pentingnya kolaborasi dan kerja sama yang kuat antara Pemerintah Pusat dengan Daerah.

Di tengah monolog ini, ditayangkan juga video realita keadaan hunian di perkotaan di Indonesia saat ini yang bertajuk "Hak untuk Perumahan Layak adalah Hak untuk Semua". Dedy menyampaikan bahwa hal yang terjadi dalam video tersebut bisa jadi adalah permasalahan dan tantangan yang ada di kota-kota besar, namun dapat terjadi di daerah manapun jika Pemerintah Daerah tidak waspada.



Tri Dewi Virgiyanti, ST, MEM  
Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman  
Kementerian PPN/Bappenas.

Tujuan dari diskusi *high-level* ini salah satunya adalah untuk kilas balik RPJMN 2015-2019 mengenai target dan capaian yang ada. Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas, Virgiyanti, menanggapi dengan data capaian rumah layak huni yang ditetilkkan lagi pada material atap, lantai dan dinding, kepadatan per rumah, akses sanitasi dan akses air minum. Data tersebut disampaikan dengan penekanan bahwa tidak hanya fisik rumah saja yang perlu dibangun, namun infrastruktur dasar juga tidak kalah penting. Selain itu, ada target pencapaian penanganan kumuh yang penanganannya lebih kompleks lagi. Capaian juga perlu ditelaah lebih jauh bagaimana *outcome* dari pembangunan yang sudah dilakukan, maka dari itu perlu adanya evaluasi ulang terhadap program yang sudah dilaksanakan.

Menanggapi isu keterbatasan Anggaran Pemerintah Belanja Daerah, Virgi menekankan bahwa perlu ada inovasi dengan keterbatasan yang ada, bisa dengan memanfaatkan kerjasama dengan swasta, seperti metode *Transit Oriented Development* (TOD), juga pembentukan Badan Layanan Umum (BLU). Lebih lanjut, Virgi mengingatkan Pemerintah Daerah untuk ikut andil dalam mensosialisasikan ketersediaan rumah bersubsidi di daerah masing-masing, agar masyarakat yang membutuhkan dapat mengakses rumah tersebut. Hal tersebut juga perlu didukung dalam hal kemudahan perizinan bagi pengembang rumah subsidi.

Dukungan pada pengembang juga disampaikan oleh Panghutan Marpaung, atau biasa disapa dengan Paul, yaitu dengan kompensasi menaikkan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) untuk rumah susun milik (rusunami) bersubsidi. Beliau mengatakan bahwa, keterbatasan KLB membuat pengembang enggan untuk membangun rumah susun (rusun) dikarenakan margin yang tidak besar. Sementara, pemerintah tidak memiliki dana yang cukup

untuk membangun rumah susun. Poin yang perlu diperhatikan adalah, ketika Pemerintah Daerah mau memberikan perhatian dalam bentuk kelonggaran perizinan, maka akan sangat membantu dalam penyediaan perumahan.

Selain itu, Paul memaparkan bahwa isu rumah susun tidak hanya perihal tantangan dalam membangun, tapi juga keberlangsungan rusun itu sendiri, khususnya rumah susun sewa (rusunawa). Saat ini, tingkat hunian rusun sekitar 60%-70%. Kendalanya adalah, Rumah susun sewa yang dibangun pemerintah memiliki kendala dimana masyarakat yang tinggal di rusunawa tersebut beranggapan bahwa rusunawa sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam menyediakan rumah sehingga masyarakat tidak taat dalam membayar sewa. Sementara, bilamana rusunawa tersebut dibangun oleh pihak swasta, maka penyewa taat membayar biaya sewa.

Perihal rusun, Virgi menambahkan juga terkadang rusun yang dibangun tidak membuat masyarakat tertarik untuk membeli, seperti lokasi yang terlalu jauh atau kenyamanan dalam rumah. Sehingga membuat masyarakat yang sudah tinggal lama di kumuh menjadi ragu untuk pindah. Tantangannya adalah bagaimana pemerintah dapat membangun rusun yang terjangkau baik secara harga dan juga jarak, dan membangun rusun yang menarik untuk ditinggali.

Tantangan berikutnya dalam pembangunan perumahan dan permukiman dan juga penanganan permukiman kumuh adalah perihal ketersediaan lahan. Virgi mengatakan bahwa perizinan menjadi *tool* utama dalam menata kawasan dan lahan yang tersedia. Hal tersebut ditanggapi oleh Doni Janarto dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) bahwa Kementerian ATR sedang mempersiapkan *land banking* untuk dapat mengelola, mengatur, dan mengawasi persediaan tanah.



Ir. Doni Janarto Widiantono, M. Eng.Sc  
Direktur Konsolidasi Tanah,  
Kementerian Agraria dan Tata Ruang



Ir. Panghutan Marpaung  
Fungsional Perencana Utama,  
Kementerian PUPR



**Dedy Kurniadi, ST., MT.,**  
Kepala Seksi Perkotaan Wilayah 2, Direktorat Pengembangan  
Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya,  
Kementerian PUPR



**Nitta Rosalin, SE, MA**  
Kasubdit Perumahan dan Kawasan  
Permukiman, Dit. SUPD II,  
Kementerian Dalam Negeri

Doni melanjutkan bahwa tantangan besar bagi penyediaan perumahan dan permukiman adalah urbanisasi yang pesat. Urbanisasi tidak hanya perihalan perpindahan masyarakat dari desa ke kota, tetapi diikuti juga dengan pergeseran mata pencaharian dari masyarakat tersebut. Sementara, masyarakat yang biasa tinggal di desa tidak dapat beradaptasi dengan pekerjaan yang tersedia di kota – contohnya petani yang biasa berkerja di sawah harus mencari mata pencaharian di kota yang tidak ada sawah. Sehingga, fenomena tersebut menimbulkan kantong-kantong kemiskinan baru di mana salah satu permasalahannya adalah mereka tidak dapat menjangkau rumah.

Saat ini, dalam penanganan permukiman kumuh, Dedy Kurniadi dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR menjelaskan mengenai program Kota Tanpa Kumuh atau KOTAKU yang berkerja sama dengan Direktorat Jenderal dalam Kementerian PUPR lainnya dalam melakukan upaya pengentasan kawasan kumuh di Indonesia. Indikator untuk menentukan kumuh adalah dari ketidak teraturan bangunan, kepadatan bangunan, dan kualitas bangunan. Dalam menjalankan program tersebut, dibutuhkan peran Pemerintah Daerah sebagai nahkoda yang dapat mengarahkan program dengan baik dengan arahan dari pusat.

Melanjutkan topik tersebut, Dedy mengkonfirmasi kepada Nitta Rosalin dari Kementerian Dalam Negeri untuk merespon isu koordinasi pusat dengan daerah. Sejauh ini, tugas dan fungsi dari Direktorat SUPD II Kementerian Dagri adalah mensinkronisasikan dokumen perencanaan nasional ke daerah, juga Rencana Strategi (renstra) Kementerian/Lembaga dengan Renstra OPD. Nitta mengingatkan penanganan permukiman perlu didukung dengan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) daerah. Selanjutnya, beliau juga mendorong daerah untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

mengingat waktu pengesahan dokumen adalah enam bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Pada sesi tanya jawab, peserta antusias bertanya dalam konteks isu dan tantangan yang dihadapi dari daerah masing-masing. Beberapa topik yang muncul adalah terkait permukiman yang dibangun di tanah ilegal, yaitu seperti Suku Bajo yang bermukim di pantai karena mata pencaharian dan kehidupan mereka memang di pantai. Padahal, permukiman tersebut termasuk dalam kategori ilegal dikarenakan lokasinya yang ada di dalam sempadan pantai. Doni menjawab bahwa untuk kasus unik seperti itu dapat dilakukan izin pengecualian. Hal ini sama dengan kasus permukiman di bantaran sungai, seharusnya dapat mencari solusi bersama – seperti memberikan izin dengan syarat-syarat lingkungan: (1) tidak mengganggu badan air; (2) orientasi muka rumah ke badan air agar tidak membuang limbah ke sungai atau laut; (3) harus aman.

Selanjutnya, forum juga mendiskusikan mengenai definisi Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR) yang dipakai untuk menentukan penerima program bantuan rumah dari Kementerian/Lembaga. Hal ini dipicu dari adanya komplain di program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Provinsi Maluku, dimana kriteria penerima bantuan adalah pendapatan 2,5 hingga 4 juta. Sementara, pendapatan yang berada di rentang tersebut di Provinsi Maluku tidak termasuk dalam MBR, dalam kata lain, masyarakat tersebut sudah mampu membangun rumah sendiri. Namun, dikarenakan adanya standar dari pusat maka bantuan tersebut luput dari masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Isu tersebut kemudian ditampung oleh narasumber untuk dapat dibahas kembali di level pusat.

## KESIMPULAN

Pada penghujung acara, Dedy sebagai moderator diskusi ini menyimpulkan bahwa selain mendorong adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar pusat dengan daerah, pemerintah daerah juga sebaiknya aktif dalam menjalin kerjasama dengan badan usaha. Inovasi dan strategi yang baru juga perlu dimasukkan kedalam dokumen RPJMD mendatang. Harapannya, hasil diskusi ini dapat menjadi inspirasi daerah dalam pembangunan perumahan dan permukiman di wilayah masing-masing.



Ir. Dedy Permadi, CES  
Pejabat Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan  
Kementerian PUPR







---

# HARI KEDUA

13 SEPTEMBER 2018

---

## 3.1

## SESI PELATIHAN I – PLENO KEBIJAKAN DASAR BERSAMA MEWUJUDKAN AGENDA SDGs; BERBAGI CERITA SUKSES PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



Sesi Pelatihan dibuka dengan Pleno Kebijakan Dasar Bersama Mewujudkan Agenda SDGs dan Berbagi Cerita Sukses Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang dimoderatori oleh Ibu Sutji Mintarti, Kasubdit Kemitraan dan Kelembagaan, Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR. Sesi ini banyak mengupas eksistensi dan komitmen pemerintah dalam pembangunan PKP, baik pemerintah pusat maupun daerah serta pengalaman sukses kolaborasi antar *stakeholders*.

**“Rumah adalah investasi terbesar rumah tangga. Pemenuhannya butuh perjuangan dan bertahap. Untuk memilikinya pun harus mencicil selama 15-20 tahun,”** ujar Nurul Wajah Mujahid, Kasubdit Perumahan Kementerian PPN/Bappenas ketika membuka sesi panel yang diamini oleh seluruh peserta. Pemenuhan rumah tidak selamanya sesuai dengan keinginan atau kebutuhan rumah tangga. Rumah berkembang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan individu, yang tentunya akan selalu berubah-ubah, **“tidak ada satu pun sistem di dunia ini yang pas untuk semua jenis keinginan dan kebutuhan rumah tangga. Ini jadi tantangan sendiri bagi pemerintah”**.

Data Susenas tahun 2017 menunjukkan bahwa hampir 80% rumah tangga di Indonesia hidup di rumah milik sendiri, namun belum tentu rumahnya berada dalam kondisi layak. Kalau pun ada yang layak, masih banyak masyarakat yang tidak dapat menjangkaunya. Hal tersebut diperkuat oleh data Akses Rumah Tangga terhadap Rumah Layak Huni (hasil olahan data Susenas 2017) yang menunjukkan hanya 38% rumah tangga di Indonesia yang hidup di rumah layak huni. Nurul Wajah Mujahid menjelaskan banyak hal yang melatarbelakangi kondisi tersebut, diantaranya adalah tertinggalnya Indonesia dalam hal penganggaran untuk pembangunan sektor PKP **“Alokasi untuk PKP dari tahun ke tahun selalu kurang dari 3% dari total APBN. Angka ini kalah besar dengan alokasi dana Pendidikan yang mencapai 20% atau kesehatan yang mencapai 5%, padahal kesehatan dimulai dari rumah,”** ujarnya yang meyakini bahwa perumahan yang layak merupakan prasyarat terciptanya sumber daya manusia yang sehat lahir dan batin.

### Eksistensi Pemerintah dalam Pembangunan PKP

Dalam penjelasannya, Nurul Wajah Mujahid juga menjabarkan bahwa berdasarkan data Susenas 2017, diperoleh fakta bahwa 70% rumah tangga di Indonesia membangun rumah secara swadaya, namun sayangnya pemerintah belum hadir dalam pengaturan, pembinaan, dan pengawasannya, **“Jika fungsi Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan (turbinwas) berjalan, tidak ada kasus rumah swadaya yang berkumpul membentuk permukiman kumuh. Tidak ada pula kasus seperti rumah di Bandung yang aksesnya diblokade oleh bangunan rumah tetangga. Seharusnya pemerintah bisa mencegah dan mengatasi hal ini”**. Tantangan pembangunan perumahan juga akan semakin besar, terutama mengingat adanya target *Sustainable Development Goals* (SDGs) tujuan 11.1 yang menyatakan bahwa pada tahun 2030, akses bagi seluruh masyarakat terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan dapat terpenuhi. Artinya perlu upaya lebih dari pemerintah, baik di level pusat ataupun daerah untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini, tentunya dibutuhkan adanya berbagai strategi percepatan untuk menjamin bagaimana agar seluruh orang di Indonesia dapat mengakses rumah layak di permukiman layak dan memiliki jaminan bermukim. **“salah satunya adalah dengan tidak berpikir bahwa beban pembangunan PKP hanya ada di satu instansi. Kolaborasi antar Lembaga harus sangat didorong”**, tambahnya.

### Komitmen Pemerintah Daerah

Moeh. Yani, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Kawasan Permukiman Bappeda Kota Surakarta berbagi pengalamannya dalam mengupayakan terwujudnya target Kota Tanpa Kumuh 100-0-100 di Kota Surakarta. Melalui *pilot project* di Kawasan Semanggi, Pemerintah Kota Surakarta mulai berhasil mendorong upaya pencapaian kota tanpa kumuh sesuai dengan mandat SDGs, dengan prinsip membangun tanpa menggosur. **“Warga tinggal di bantaran sungai yang merupakan wilayah Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Nasional. Kemudian melalui kesepakatan antara Pemkot Surakarta, BBWS, dan masyarakat, disepakati berbagai rencana penataan, termasuk konsolidasi tanah dengan pola permukiman.”**, ujar Moeh. Yani. Konsolidasi tanah biasanya merupakan hal yang seakan sulit dilakukan dan jarang menjadi ‘menu’ pilihan untuk penataan kawasan permukiman kumuh, namun Moeh. Yani menjelaskan bahwa hal tersebut bukanlah tidak mungkin asalkan adanya komitmen terlebih dahulu dari pimpinan dan jajaran pemerintah daerah untuk menjadikan isu perumahan sebagai salah satu isu prioritas, **“perumahan atau papan masuk ke dalam visi RPJMD Kota Surakarta tahun 2016-2021, sehingga PKP menjadi salah satu prioritas pembangunan di kota kami”**, ujarnya. Komitmen juga perlu diikuti oleh kekuatan kinerja para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Surakarta, seperti bagaimana OPD dapat memadukan program yang tersebar di seluruh OPD dan memastikan keterpaduan program dengan instansi vertikal (pemerintah pusat). OPD sebagai agen penerdaya (*enabler*) juga harus dapat mendorong keterlibatan pihak swasta melalui kegiatan CSR nya dan yang terpenting adalah mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan, **“masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan sehingga krusial kiranya pemerintah kota berdialog langsung mengajak masyarakat agar bergerak bersama menata kampungnya”**, tambahnya.



Moeh Yani, S.Sos, M.M  
Kepala Bidang Kawasan Permukiman  
Bappeda Kota Surakarta



H. Syachril, S.H., M.Si, M.Hi  
Ketua Badan Amil Zakat Nasional  
Kab. Muara Enim Sumatera Selatan

### Kolaborasi Antar Stakeholders

Seperti yang disebutkan oleh Nurul Wajah Mujahid dalam pembukaannya, persoalan keterbatasan anggaran, baik APBN maupun APBD seakan menjadi isu klasik yang terjadi di seluruh daerah. Namun, nyatanya terdapat juga banyak daerah yang berhasil mengatasi tantangan tersebut melalui mekanisme kolaborasi pendanaan antar stakeholders. Salah satunya adalah Pemerintah Kota Kab. Muara Enim yang berhasil ‘menemukan’ partner dengan visi yang sama terkait dengan pemenuhan akses sanitasi, yaitu dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Muara Enim melalui pemanfaatan dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sadaqoh). Saat ditanya mengenai alasan keterlibatannya, Bapak H. Syachril, sebagai Ketua Baznas Kab. Muara Enim mengatakan, **“Allah SWT menyukai orang-orang yang menyucikan dirinya. Hal tersebut jelas tertulis dalam salah satu surat di dalam Al-Quran. Selain itu, terdapat hadist Rasulullah kebersihan juga merupakan sebagian dari iman. Buang kotoran pada sumber air juga merupakan salah satu dari 3 hal yang menyebabkan kutukan berdasarkan hadist Rasulullah”**. Tidak main-main, dukungan tersebut pun dinyatakan dalam terbitnya berbagai Fatwa MUI terkait air minum dan sanitasi. Salah satunya adalah Fatwa MUI No. 001/MUNAS-0X/MUI/2015 tentang ZISW (Zakat, Infaq, Sadaqoh, dan Wakaf) untuk Air dan Sanitasi.

Hingga tahun 2018, Baznas Kab. Muara Enim telah mengalokasikan hampir Rp1,5 Miliar untuk pembangunan fasilitas sanitasi bagi 300KK. Jumlahnya memang tergolong masih kecil dibandingkan total anggaran yang diperlukan, namun kekuatannya dalam mengadvokasi masyarakat tidak dapat dipandang sebelah mata.

Selain dalam pembangunan fasilitas fisik sanitasi, Baznas Kab. Muara Enim juga berperan besar membantu pemerintah daerah dalam upaya advokasi dan sosialisasi mengenai pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kepada masyarakat. **“kami juga memberdayakan para da’i dan dai’yyah di Kab. Muara Enim yang terjun langsung ke masyarakat untuk mengkampanyekan pentingnya stop buang air besar sembarangan, termasuk menerbitkan buku khutbah jumat dan bulletin sanitasi kepada masyarakat. Pendekatan kepada masyarakat dari sisi religius kami pandang krusial untuk masyarakat yang sebagian besar beragama islam dan menganut nilai religius yang tinggi dalam kesehariannya”**, ujar H. Syahril.

Setali tiga uang dengan Kab. Muara Enim, upaya kolaborasi dalam pembangunan PKP juga mulai dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui program Grya Kita. Diawali dari kegelisahan akan peliknya persoalan perumahan di Jawa Barat, para praktisi dan akademisi perumahan di Jawa Barat sepakat membentuk sebuah program bernama Grya Kita. **“ini awalnya merupakan sebuah gerakan yang kita tawarkan kepada pemerintah daerah. Kami sadar perlu adanya reformasi dari berbagai hal, salah satunya dari sisi kelembagaan untuk dapat mengatasi persoalan perumahan di Jawa Barat”**, ujar Encep Marsadi selaku salah satu founder Grya Kita. Berbekal tagline **“1 Resep 4 Obat Bersama”**, tim Grya Kita bersama dengan Pemprov Jawa Barat aktif melaksanakan berbagai advokasi kepada seluruh 27 kab/kota untuk mengkampanyekan pentingnya sistem pendataan bidang perumahan agar menjadi dasar bagi perencanaan perumahan yang baik. Selain itu, upaya penguatan kapasitas bagi Pokja PKP di seluruh kab/kota dan upaya sosialisasi/audiensi kepada pelaku PKP (Baik di kalangan eksekutif maupun legislatif) juga sangat gencar dilakukan. Hasilnya? Meskipun terlihat pelan namun sedikit demi sedikit mulai membuahkan hasil. **“Setidaknya saat ini kualitas perencanaan dan pendataan sudah mulai membaik. Kami juga baru saja meluncurkan Unit Klinik Rumah dan Aplikasi Klinik Rumah Grya Kita yang membantu penguatan data dan membuka akses informasi kepada masyarakat yang ingin membeli rumah layak, terjangkau, dan keberlanjutan”**.



Ir. Encep R. Marsadi  
Founder Grya Kita



Ir. Sutji Mintarti, MT,  
Kepala Seksi Fasilitas Kemitraan,  
Sub Direktorat Fasilitas Pemberdayaan dan Kemitraan  
Kementerian PUPR

### 3.2

## SESI PELATIHAN II – PLENO PENYUSUNAN DAN PEMANFAATAN DATA SERTA INDIKATOR DALAM PENYELENGGARAAN PKP

**“Monitoring dan Evaluasi menjadi unsur penting dalam pembangunan untuk mengukur kebermanfaatan program/kegiatan”**, tutur Heriyadi, Kasubdit Sistem Pelaporan Kementerian PPN/Bappenas dalam acara Lokalatih Sinergi Penyusunan RPJMN-RPJMD bidang PKP di Makassar tanggal 13 September 2018. Heriyadi menilai masa penyusunan RPJMN 2020-2024 dan penyusunan RPJMD bagi daerah yang baru melaksanakan Pilkada menjadi momen penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan, termasuk urusan monev. **“Sering perencanaan sampai ke penganggaran dan termasuk monevnya kurang nyambung. Selain itu, menilai kebermanfaatan juga harus terlepas dari kepentingan sektoral. Bappenas tidak boleh lagi terperangkap dalam masalah itu. Badan perencanaan bukan menjadi perpanjangan tangan dari kepentingan sektoral”**, ungkap Heriyadi.

Heriyadi menilai, mengukur kebermanfaatan harus dilakukan dengan menilai keselarasan kerangka logis, dari mulai input, output, hingga **outcome** “pemantauan harus dilakukan dari mulai level komponen input, hingga output. **Outcome juga harus diukur setiap tahunnya karena kebermanfaatan akan terlihat dari pencapaian outcome tersebut**”. Selain itu, prosedur yang sistematis juga akan sangat membantu pemerintah sebagai pengambil keputusan dalam melakukan evaluasi. **“Hasil evaluasi tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar perencanaan, sehingga sangat krusial kiranya tahapannya dapat dipahami oleh seluruh jajaran pemerintah”**, tambah Heriyadi.



Heriyadi, S. Sos, M. T, M. Sc.  
Kasubdit Sistem Informasi & Pelaporan PEPP  
Kementerian PPN/Bappenas

### Mengarusutamakan Tujuan SDGs ke Dalam Perencanaan Pembangunan

Ditetapkannya Sustainable Development Goals (SDGs) secara global mau tidak mau akan berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan di Indonesia. Artinya, integrasi SDGs ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah mutlak dilakukan. Untuk Indonesia sendiri, pengarusutamaan SDGs ke dalam rencana pembangunan telah dilakukan sejak RPJMN 2015-2019 dimana 57% dari 169 indikator SDGs telah diintegrasikan. Dalam arahnya mengenai penyusunan RPJMN 2020-2024 yang akan disusun, Menteri PPN atau Kepala Bappenas mengamanatkan agar 169 indikator SDGs dapat terintegrasikan ke dalamnya. Terkait dengan pelaksanaan SDGs tersebut, tentunya dibutuhkan prosedur perencanaan yang tepat sehingga ketercapaiannya dapat diukur dengan baik, **“dalam melaksanakan SDGs seluruh program/kegiatan harus disusun berdasarkan Result Chain, yaitu teori perubahan untuk menunjukkan bagaimana sebuah program akan memicu perubahan dari kegiatan menjadi dampak. Dimulai dari input sampai outcome. Result chain ini dibutuhkan untuk mengukur akuntabilitas”**, tutur Ira Lubis, Fungsional Perencana Bidang Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas.

Dalam paparannya, Ia juga menjelaskan bahwa saat ini terjadi perubahan konsep perhitungan dari MDGs ke SDGs, seperti contohnya dalam perhitungan Rumah Layak Huni. Biasanya rumah layak huni diukur menggunakan pembobotan 4 komponen, yaitu Luas Lantai Per Kapita, jenis material bangunan (atap, lantai, dan dinding), akses air minum, dan akses sanitasi, **“Namun dalam SDGs, rumah layak huni tidak lagi diukur menggunakan pembobotan komponen-komponen tersebut, melainkan seluruh komponen harus terpenuhi mutlak 100%.”** Jadi jika salah satu komponen tidak layak, maka rumah tersebut gugur dinyatakan sebagai rumah layak huni. Analoginya kita tidak mungkin menyebutkan seseorang itu sehat padahal dia sedang sakit kepala” ujarnya. Penyesuaian tersebut bukanlah tanpa konsekuensi, Ira Lubis menjelaskan bahwa setelah mengolah data Susenas 2017 dengan menggunakan konsep tersebut, ternyata hanya 23,7 sampai dengan 26 juta rumah tangga (37,77%) yang memiliki akses terhadap rumah tangga. **“Oleh karena itu, ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua, penting kiranya pemerintah melakukan penyesuaian terhadap program/kegiatannya agar dapat mencapai indikator tersebut”**.



Ira Lubis, S.T., MIDP  
Fungsional Perencana Subdit Perumahan, Dit.  
Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman,  
Kementerian PPN/Bappenas



Aldy Mandikanto, S.T., M. Sc.  
Fungsional Perencana Subdit Sanitasi,  
Dit. Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman,  
Kementerian PPN/Bappenas

Perubahan konsep perhitungan juga terjadi dalam aspek air minum dan sanitasi. Untuk air minum misalnya. Dalam SDGs air minum dituntut untuk dapat mencapai akses layak dan aman. Artinya selain harus memenuhi standar kelayakan, air minum juga harus dapat memenuhi standar kualitas fisik dan biologi. **“Jadi penyediaan akses layanan air minum memang harus bergerak menuju safely managed atau aman. Untuk saat ini kriteria layak yang digunakan pun diarahkan untuk memenuhi standar aman tersebut”**, Nur Aisyah Nasution, Fungsional Perencana Bidang Air Minum Kementerian PPN/Bappenas menjelaskan dalam paparannya. Kelayakan sendiri dihitung dari sumber air minum dan mandi yang harus dalam sistem terlindungi, kemudian dikombinasikan dengan jarak tempuh waktu pengambilan air. **“Dalam SDGs juga kita harus menghitung juga jarak tempuh pengambilan air dimana tidak boleh lebih dari 30 menit. Ini berimplikasi apakah program kran umum yang selama ini dilakukan oleh pemerintah masih relevan?”** tutur Nur Aisyah.

Untuk sanitasi. Aldy Mardikanto, Fungsional Perencana Bidang Sanitasi Kementerian PPN/Bappenas menjelaskan bahwa perubahan dari MDGs ke SDGs tidak terlalu signifikan. **“Kejaran sanitasi dalam SDGs adalah safely managed sanitation atau akses aman dan layak. Akses dasar hanya berlaku untuk daerah perdesaan saja”**, ujarnya. Akses sanitasi aman sendiri diukur berdasarkan pengguna fasilitas sanitasi yang harus merupakan rumah tangga sendiri, bangunan atas menggunakan leher angsa, dam bangunan bawah menggunakan septic tank dan terhubung dengan Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL). **“Septic tank juga tidak sembarang septic tank, melainkan harus disedot setidaknya sekali dalam jangka waktu tertentu. Jika septic tank tidak jelas frekuensi penyedotannya dan tidak terhubung ke SPAL, maka masih termasuk dalam akses sanitasi layak”**, tambah Aldy.



Hasnani Rangkuti, Ph. D.  
Kasubdit Kesehatan dan Perumahan,  
Dit. Kesejahteraan Rakyat  
Badan Pusat Statistik

### Pemanfaatan Data Badan Pusat Statistik (BPS)

Dalam mengukur ketercapaian pembangunan, Pemerintah Indonesia memiliki Lembaga statistik yang berperan dalam perumusan metode perhitungan pengumpulan data hingga mengolahnya agar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh kementerian/Lembaga, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS). Namun sayangnya belum banyak yang memahami dan cara memanfaatkan data BPS sebagai dasar perencanaan.

Terkait dengan bidang pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman, masing-masing pemerintah daerah atau lembaga sektoral seringkali memilih menggunakan metodenya sendiri sehingga di kemudian hari, data menjadi tidak seragam dan tidak dapat diukur agregat pencapaiannya secara nasional. Padahal, BPS secara rutin melaksanakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang hasilnya dapat digunakan untuk perencanaan program pembangunan. **“Susenas is the mom of the survey. Sudah dilaksanakan sejak tahun 1963 dan termasuk yang paling krusial karena 4 dari 7 indikator kebijakan makro Presiden Jokowi berada di Susenas”**, tutur Hasnani Rangkuti, Kasubdit Statistik Kesehatan dan Perumahan dari Badan Pusat Statistik dalam acara Lokalatih Sinergi Penyusunan RPJMN-RPJMD Bidang PKP di Kota Makassar.



Nur Aisyah Nasution, S.T., M.S.  
Fungsional Perencana Subdit Air Minum,  
Dit. Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman,  
Kementerian PPN/Bappenas

Terkait dengan data perumahan dan permukiman, Hasnani menjelaskan bahwa Susenas didesain untuk memiliki 3 (tiga) modul, yaitu Modul Konsumsi/Pengeluaran Rumah Tangga, Modul Sosial Budaya, serta Modul Kesehatan dan Perumahan yang dilaksanakan setiap 3 tahun sekali. Jenis pertanyaan di dalam Susenas Modul akan lebih terperinci dari Susenas KOR yang dilaksanakan setiap tahunnya.

“Misal dalam Susenas KOR hanya ditanyakan perihal status kepemilikan, jenis material bangunan, dan luas lantai per kapita. Sedangkan di Modul MKP menjabarkan karakter dan preferensi penghuni juga, seperti keinginan untuk membeli rumah, besar nilai sewa, dan lain-lain.”, tuturnya. Hasnani juga mengungkapkan bahwa pada umumnya data pembangunan perumahan yang digunakan adalah backlog, namun data backlog yang digunakan selama ini bukanlah konsep BPS, melainkan hasil kesepakatan dari sektor, **“Data backlog kepemilikan berdasarkan kesepakatan sektor dihitung berdasarkan jumlah rumah tangga yang tinggal di rumah bukan milik sendiri dan tidak memiliki rumah di tempat lain. Sedangkan backlog kependudukan hitungannya lebih kompleks, selain memperhitungkan status bangunan juga menghitung berapa keluarga yang tinggal di rumah tersebut dibandingkan dengan luas per kapitanya”**.

Untuk air minum dan sanitasi, sesuai dengan amanat SDGs, Hasnani menjelaskan bahwa standar yang akan dicapai lebih besar, yaitu sanitasi layak dan air minum layak serta aman. Namun khusus air minum, ia mengakui bahwa BPS masih mengalami kesulitan untuk mengukur definisi **“aman”** tersebut, **“Konsep aman sendiri baru muncul di tahun 2017 dan itu hanya bisa diukur melalui uji laboratorium. BPS melalui Susenas belum dapat menangkap apa yang diharapkan terkait standar aman tersebut”**,ungkapnya. Konsep-konsep SDGs juga tentunya akan mengubah konsep perhitungan rumah layak huni, air minum, dan sanitasi yang selama ini digunakan, **“Jika akan diubah maka akan mengubah tren data dan itu membutuhkan kesepakatan di level yang lebih tinggi”**, kata Hasnani.



Mittha Hasti, ST, MT  
Kasubdit Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian,  
Ditjen Penyediaan Perumahan  
Kementerian PUPR



## 3.3

## SESI PELATIHAN III – PLENO PENGENALAN METODE PENYUSUNAN KKL

Salah satu tujuan dalam kegiatan Lokalatih Sinergi RPJMN 2020-2024 dengan RPJMD bidang Perumahan dan Permukiman melatih pemerintah daerah dalam menyusun kerangka kerja logis atau *Logical Framework (logframe)*. *Logframe* merupakan panduan yang menyajikan hubungan antara tujuan hingga kegiatan dalam suatu penyelenggaraan program. Selain itu, *logframe* membantu pelaksana program dalam merencanakan, melaksanakan, monitoring, dan evaluasi pembangunan, dalam hal ini dikhususkan pada bidang perumahan dan permukiman di daerah masing-masing. Sesi ini terbagi menjadi tiga bagian, diantaranya paparan pengenalan *logframe*, pelatihan penyusunan *logframe*, dan presentasi hasil dari penyusunan *logframe*.

Pengenalan *logframe* dipaparkan oleh Hendra Murtidjaja, dari Tim *Central Collaboration Management Unit* atau Tim CCMU. Sesi pengenalan ini menjelaskan latar belakang dari perlunya penyusunan *logframe* sebagai instrumen perencanaan di daerah. Berdasarkan penilaian kapasitas yang dilakukan sebelumnya, diidentifikasi bahwa salah satu tantangan dalam pembangunan perumahan dan permukiman di daerah adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam merencanakan program yang tepat menjawab isu utama di daerah. Untuk itu, dalam lokalatih ini konsep *logframe* dikenalkan kepada pemerintah daerah yang baru melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah serentak dan akan menyusun RPJMD dalam waktu dekat.



Hendra Murtidjaja  
Team Leader  
*Central Collaboration Management Unit (CCMU)*

Hendra Murtidjaja menjelaskan bahwa terdapat delapan langkah yang perlu dikerjakan untuk menyusun *logframe*, mulai dari analisis kondisi, analisis isu dan masalah, analisis solusi, dan analisis strategi sebagai tahap persiapan. Selanjutnya proses penyusunan dilanjutkan dengan penulisan program ke dalam tabel *logframe* yakni penyusunan logika intervensi, penyusunan indikator, identifikasi sumber dan alat verifikasi, serta penyusunan asumsi atau risiko. Penjelasan dilanjutkan dengan pengenalan praktik penyusunan *logframe*, yang menggunakan sebuah studi kasus di Kota Siang Malam berisi tiga isu, diantaranya isu kebutuhan rumah perkotaan, isu permukiman kumuh di bantaran sungai, dan isu permukiman kumuh di pusat kota.

Seluruh peserta kemudian dibagi menjadi tiga kelas, yang masing-masing mengerjakan *logframe* skala kota. Di masing-masing kelas, peserta dibagi kembali menjadi tiga kelompok lebih kecil untuk mengerjakan masing-masing isu yang disebutkan sebelumnya. Rangkaian diskusi ini dipandu oleh fasilitator dan narasumber, dengan media metaplan, *sticky cloth*, serta pengisian tabel *logframe* di laptop. Seluruh peserta didorong untuk aktif menyampaikan pendapatnya melalui media tersebut dalam mengidentifikasi kondisi eksisting, penyusunan pohon masalah, serta penyusunan pohon solusi. Pada tahap berikutnya, ketiga kelompok di masing-masing kelas bekerja sama untuk menyusun *logframe* kelas. Ketiga *logframe* kelas tersebut di kemudian dipresentasikan di hadapan para narasumber penanggap di hari berikutnya.



---

**HARI KETIGA**

14 SEPTEMBER 2018

---

## 4.1

## PRESENTASI

### HASIL PENYUSUNAN KKL PEMBANGUNAN

Setelah peserta lokalatih menyusun Kerangka Kerja Logis (KKL) sesuai dengan studi kasus dari Kota Siang Malam yang diberikan, perwakilan dari masing-masing kelas mempresentasikan hasil KKL. Masing-masing mengirimkan satu perwakilan yang akan ditanggapi oleh narasumber penanggap yaitu Agus Sulaeman, ST, MM, Merlina Rubiati, S.Sos, MCP, dan Nurul Wajah Mujahid, ST, MPA. Kelas 1 diwakilkan oleh Hamdan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kelas 2 diwakilkan oleh Syamsuduha dari Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Kelas 3 diwakilkan oleh Miryati dari Kabupaten Lombok Barat.

Kelas 1 memiliki *goal* "Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan" dengan tiga *outcome*: (1) 100% rumah memiliki akses sanitasi yang layak pada tahun 2024; (2) 100% rumah tangga memiliki akses air minum yang layak tahun 2024; dan (3) terbangunnya 80% MBR memiliki rumah layak huni pada tahun 2024. Sementara, kelas 2 mempunyai *goal* "Mendukung terwujudnya Kota Siang Malam yang inklusif, nyaman, aman dan berkelanjutan" dengan dua *outcome*: (1) meningkatnya akses warga yang tinggal di perumahan dan permukiman layak; dan (2) menurunnya luasan kumuh di tahun 2019. Terakhir, kelas 3 bertujuan "Membangun permukiman inklusif, aman, tangguh, nyaman, produktif dan berkelanjutan" dengan tiga *outcome*: (1) meningkatnya akses air minum di kawasan permukiman Kota Siang Malam; (2) akses sanitasi layak dan sehat untuk Kota Siang Malam; dan (3) tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat Kota Siang Malam.

Secara garis besar, narasumber penanggap berkomentar bahwa masing-masing kelas sudah paham garis besar makna dari *goal*, *outcome*, *output*, dan *activities*. Beberapa poin yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa dalam penyusunan KKL harus memastikan *activities* harus dapat menjawab dan relevan sampai *goal*. Kekurangan dari ketiga KKL adalah belum ada *activities* yang berupa hal baru dan inovasi, namun hal tersebut dimaklumi mengingat terbatasnya waktu penyusunan KKL.

## KELAS 1



Hamdan  
Provinsi Nusa Tenggara Barat

## KELAS 2



Syamsuduha  
Kabupaten Sidenreng Rappang

## KELAS 3



Miryati  
Kabupaten Lombok Barat.

## NARASUMBER PENANGGAP HASIL PRESENTASI KKL



Merlina Rubiati, S.Sos, MCP  
Kepala Subdit Kemitraan dan Kelembagaan  
Kementerian PUPR



Nurul Wajah Mujahid, ST, MPA  
Kasubdit Perumahan  
Kementerian PPN/Bappenas



Agus Sulaeman, ST, MM  
Kasubdit Standar dan Keterpaduan  
Perencanaan  
Kementerian PUPR

## 4.2

## Talkshow dengan Eselon II Kementerian PUPR – STRATEGI KEMENTERIAN PUPR DALAM MENDUKUNG SDGS GOAL 11

Pada hari ketiga, Lokalatih Sinergi RPJMN 2020-2024 dengan RPJMD bidang Perumahan dan Permukiman menghadirkan Pejabat Eselon II dari Kementerian PUPR, yang dihadiri oleh **Ir. Dwityo Akoro Soeranto, MURP** selaku **Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan, Ir. Eko Djoeli Heripoerwanto, MCP** selaku **Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Kusumawhardani, ST, MT** selaku **Kepala Subdit Perencanaan Teknik**, mewakili **Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman**, dan **Ir. Maryoko Hadi, Dipl. E.Eng, MT** selaku **Kepala Subdit Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan**, mewakili **Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman**. Acara diskusi dipimpin oleh **Ir. Hardi Simamora, MPL**.

Diskusi bertujuan untuk menyampaikan strategi Kementerian PUPR dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Tujuan 6 dan 11. Dalam lingkup Negara Indonesia, tujuan tersebut diterjemahkan dalam beberapa indikator, yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses air minum layak, dan akses sanitasi layak. Sementara indikator keamanan dalam bermukim dan keterjangkauan menjadi informasi tambahan dalam pencapaian SDGs di Indonesia. Keempat narasumber menekankan pentingnya integrasi perencanaan pembangunan untuk pencapaian SDGs secara optimal. Selain itu, narasumber juga memberikan arahan dan motivasi kepada pemerintah daerah dalam turut serta berkontribusi mencapai SDGs di daerah masing-masing.

### Sesi Paparan

Integrasi pembangunan dimulai melalui penyusunan RP3KP atau Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai acuan induk dalam merencanakan pembangunan perumahan di daerah. Selain itu, dibutuhkan pembentukan Pokja PKP atau Kelompok Kerja Perumahan dan Permukiman sebagai pelaksana koordinasi pembangunan perumahan dan permukiman di daerah masing-masing. Diharapkan dengan adanya RP3KP dan Pokja PKP daerah dapat memimpin pelaksanaan program penyediaan dan pembiayaan perumahan.

Dalam kesempatan ini Dwityo Akoro Soeranto menjelaskan bahwa rumah memiliki peranan yang penting bagi masyarakat, yakni sebagai tempat tinggal sekaligus merupakan aset investasi terbesar dalam keluarga. Namun saat ini belum seluruh masyarakat menghuni rumah yang layak, yang disebabkan oleh penyediaan yang tidak sebanding dengan tingginya kebutuhan. Tingginya kebutuhan perumahan di perkotaan disebabkan oleh tingginya tingkat urbanisasi. Pada tahun 2025 diprediksi sekitar 67% masyarakat Indonesia tinggal di perkotaan,



Ir. Eko Djoeli Heripoerwanto, MCP  
(Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan)  
Kementerian PUPR



Ir. Dwityo Akoro Soeranto, MURP  
(Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan)  
Kementerian PUPR

baik disebabkan oleh migrasi penduduk maupun meluasnya wilayah perkotaan. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah harus mempersiapkan kondisi tersebut karena kalau tidak maka akan menyebabkan munculnya permukiman kumuh di wilayah perkotaan. Untuk dapat mengatasi tantangan di bidang perumahan dan permukiman sekaligus mencapai target SDGs, Maryoko Hadi menjelaskan bahwa dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sebagai pelaku penyediaan rumah swadaya, pengembang swasta, hingga filantropi dengan pemerintah daerah sebagai pemimpinnya. Pencapaian tujuan SDGs memerlukan langkah strategis yang mulai dari perencanaan yaitu memadukan perencanaan infrastruktur permukiman baik skala kota maupun regional. Dalam aspek regulasi yang perlu dilakukan adalah penguatan tata kelola penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Pada aspek pendanaan prinsip yang dikedepankan adalah peningkatan kualitas belanja pemerintah (*money follow program*) dan identifikasi model pembiayaan inovatif dan non-konvensional. Sementara pada aspek kemitraan, yang perlu dikedepankan adalah kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, beberapa strategi yang disusun oleh Kementerian PUPR dalam Rumusan awal RPJMN 2020-2024 adalah sinkronisasi kebijakan dan regulasi, strategi koordinasi dan kolaborasi kelembagaan, penguatan pendataan dan sistem informasi perumahan, manajemen dan inovasi bidang pertanahan, sinergi pembangunan perumahan dengan sarana dan prasarana pendukung, skema kepenghunan rumah melalui sewa, sistem pembiayaan perumahan, industri perumahan sebagai pendekatan pembangunan rumah, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pembangunan perumahan dan permukiman.

Kusumawhardani menambahkan bahwa pemerintah memiliki waktu hingga 2024 dalam mencapai target kota layak huni, karena mulai tahun 2025 pemerintah perlu fokus mencapai target baru yakni kota hijau, sesuai dengan strategi pemenuhan standar pelayanan perkotaan dalam UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dengan demikian RPJMN 2020-2024 memiliki peran sangat penting dalam mencapai target kot layak huni. Saat ini pembangunan perumahan dan permukiman dilaaaukan oleh masing-masing sektor, sehingga hasilnya kurang optimal. Dengan demikian, ke depan pemerintah harus mengintegrasikan program satu sama lain.

Terkait aspek pembiayaan perumahan, Eko Djoeli Heripoerwanto memberikan arahan kepada pemerintah daerah bahwa dalam menyediakan perumahan jangan hanya mengandalkan APBD, tetapi perlu memacu pembiayaan perumahan berbasis pasar yang disediakan oleh pengembang swasta. Dalam praktik itu, peran pemerintah sebagai regulator perlu dikedepankan sehingga pembiayaan perumahan dapat memenuhi Prinsip *Affordable, Available, Accessible, dan Sustainable*. *Affordability* berarti berbagai pilihan rumah tersedia



Kusumawhardani, ST, MT  
(Kepala Subdit Perencanaan Teknik)  
Kementerian PUPR



Ir. Maryoko Hadi, Dipl. E.Eng, MT  
(Kepala Subdit Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan)  
Kementerian PUPR

dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. *Availability* berarti skema pembiayaan untuk MBR ada, baik melalui KPR bersubsidi atau pembiayaan berbasis tabungan. *Accessibility* berarti skema pembiayaan tersebut dapat diakses oleh MBR dan menyesuaikan dengan profil MBR yang sebagian besar pelaku ekonomi informal. Sementara *sustainability* berarti dana untuk pembiayaan perumahan itu selalu ada, bukan biaya yang habis dipakai.

### Sesi Diskusi

Dalam sesi diskusi, terdapat beberapa poin bahasan yang ditanyakan oleh peserta dan dijawab oleh narasumber. Poin-poin bahasan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.

Dalam melaksanakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 7 tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Dalam peraturan tersebut tertera kriteria warga penerima bantuan, diantaranya sesuai dengan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan diverifikasi oleh kabupaten/kota, rumah mengelompok sekitar 20 rumah, dan penghuni bersedia melaksanakan pembangunan secara swadaya. Terkait besaran dana, Kementerian PUPR menggunakan basis wilayah, yaitu sebesar 15 juta rupiah, kecuali Provinsi Papua dan Papua Barat dengan besaran 30 juta rupiah. Salah satu persyaratan penerima BSPS adalah memiliki tanah yang sah, sehingga program ini tidak dapat memperbaiki rumah di atas air.

Dalam mengatasi perumahan dan permukiman kumuh, program BSPS sejalan dengan program KOTAKU, dalam arti BSPS menggunakan data KOTAKU untuk menentukan lokasi pembangunan atau perbaikan perumahan, dengan harapan hasil dari pembangunan lebih optimal, meningkatkan kualitas permukiman dengan KOTAKU serta meningkatkan kualitas perumahan dengan BSPS. Mengatasi perumahan dan permukiman kumuh tidak cukup dilakukan dengan peningkatan kualitas tetapi membutuhkan pencegahan. Pencegahan kumuh menurut UU No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari kegiatan non fisik, seperti pengawasan dan pengendalian, serta pemberdayaan masyarakat. Delineasi kumuh tidak tercantum dalam peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), karena kondisi kumuh itu dinamis sehingga bisa jadi selanjutnya area tersebut telah pulih dari persoalan kumuh. Dengan demikian kumuh lebih baik dimasukkan dalam indikasi program, bukan dalam peta.

UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Telah ada pembahasan sebelumnya di tingkat pusat yang menyimpulkan bahwa saat ini tidak mungkin untuk dilakukan perubahan regulasi. Dengan demikian hal yang dapat dilakukan adalah optimalisasi DAK Perumahan dan program BSPS, optimalisasi penanganan kumuh di bawah 10 Ha bagi pemerintah kota dan 10-15 Ha bagi pemerintah provinsi,



Sumber: <https://pbs.twimg.com/>

Ir. Hardi Simamora, MPL  
(Direktur Rumah Swadaya Direktorat Jenderal  
Penyediaan Perumahan)  
Kementerian PUPR

Pemerintah banyak yang belum mementingkan keberadaan data perumahan, padahal program yang baik dan tepat sasaran adalah program yang berbasis pendataan. Direktorat Infrastruktur permukiman memiliki agenda *roadshow* tentang kebijakan satu data, dan mengajak pemerintah daerah untuk melakukan penyiapan pengumpulan data, karena pihak yang paling berpotensi dalam penyediaan data adalah pemerintah daerah. Program KOTAKU memiliki *baseline* data terkait kumuh yang selalu terbaharui. Data tersebut bisa digunakan untuk menambah informasi di daerah.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari sesi diskusi ini adalah pentingnya integrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Untuk melaksanakan hal tersebut, terlebih dahulu dibutuhkan penyusunan RP3KP dan pembentukan Pokja PKP di daerah yang masing-masing memiliki peran sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dan koordinasi antarlembaga di daerah. Hal yang tidak kalah penting untuk disusun adalah pendataan perumahan dan permukiman serta penyajiannya dalam sistem informasi perumahan dan permukiman di daerah. Dengan demikian, diharapkan dalam menjalankan perannya pemerintah dapat sekaligus berupaya untuk mencapai target SDGs khususnya Tujuan 6 dan 11.

---

# LAMPIRAN

---

## LAMPIRAN A

(Sambutan Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman)



**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Sambutan  
Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Yang terhormat,

Direktur Konsolidasi Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang  
Bapak/Ibu Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota  
Bapak/Ibu Narasumber, Moderator, Fasilitator dan Peserta Lokalatih Sinergi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
serta Kementerian Dalam Negeri  
Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati,

Assalamu alaikum wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua,

Pertama, perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran bapak/ibu sekalian dalam kegiatan Lokalatih Sinergi Penyusunan RPJMN 2020-2024 dan RPJMD 2018-2022 bagi daerah yang telah selesai Pilkada. Kegiatan ini menjadi sangat penting karena terkait dua hal: Pertama, bahwa RPJMN 2020-2024 merupakan fase terakhir pembangunan lima tahunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2004-2025; Kedua, berkenaan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs) 2030*.

Bapak/Ibu sekalian,

Bertempat tinggal dalam hunian dan lingkungan yang sehat dan layak merupakan hak konstitusi warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28(h). Penyediaan perumahan bagi masyarakat berpendapatan menengah ke atas telah sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Pemerintah hanya berperan sebagai regulator agar pelaksanaannya tidak memberikan dampak negatif baik terhadap lingkungan hidup maupun kehidupan sosial masyarakat umumnya. Hal ini tentunya tidak berlaku untuk masyarakat berpendapatan rendah karena mereka masih menghadapi banyak kesulitan untuk menyediakan rumahnya sendiri maupun mengakses pasar perumahan apabila tanpa disertai fasilitasi pemerintah. Fasilitasi tersebut bisa dilakukan pada sisi *supply* maupun *demand* termasuk penyediaan infrastruktur dasar seperti air minum dan sanitasi. Fasilitasi penyediaan hunian bagi masyarakat miskin dan berpendapatan rendah merupakan *affirmative action* dan keputusan politik untuk pemerataan kesejahteraan (*welfare distribution*). Oleh karena itu pelaksanaannya harus dilakukan secara efektif dan efisien. Fasilitasi pemerintah dalam penyediaan perumahan tidak diartikan sebagai upaya membangun rumah bagi masyarakat tetapi merupakan upaya untuk mempermudah akses mereka terhadap hunian yang layak, baik hunian sewa maupun hunian milik sendiri. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman seharusnya ditujukan untuk berbagai kelompok masyarakat yang berbeda baik dari sisi sosial, ekonomi, dan budaya.

Bapak/Ibu sekalian,

Penanganan permukiman kumuh baik yang legal maupun ilegal merupakan salah satu langkah penting dalam program pengentasan kemiskinan. Rumah merupakan tempat persemaian budaya dan pembentukan karakter manusia. Kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang sehat dan layak terkait erat dengan kesehatan masyarakat dan merupakan prasyarat terbentuknya sumber daya manusia yang sehat lahir dan batin. Kita tidak boleh membiarkan ada masyarakat yang menempati hunian yang membahayakan dirinya, keluarganya dan masyarakat sekitarnya. Fasilitasi penyediaan hunian yang layak akan memberikan dampak positif dalam menurunkan biaya kesehatan masyarakat dan memelihara produktifitas masyarakat. Lebih dari itu, hal tersebut juga akan mengurangi belanja pemerintah dalam penyediaan biaya kesehatan bagi masyarakat.

Bapak/Ibu sekalian,

Dalam kesempatan lokalatih kali ini, kami mengupayakan terjadinya keselarasan dan sinergi perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di tingkat pusat dan daerah terutama dalam kerangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengamanatkan kepada kita untuk menyusun peta jalan dan rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah. Dengan demikian maka SDGs diharapkan menjadi kerangka kerja dalam penyusunan RPJMN 2020-2024 serta RPJMD 2018-2022 terutama terkait dengan Goal 6. tentang Air Minum dan Sanitasi serta Goal 11 tentang perumahan tidak layak dan permukiman kumuh. Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional memberi arahan bahwa agar dalam penyusunan RPJMN dan RPJMD dapat dilakukan selaras dengan SDGs, dengan demikian "Buy One Get Two". Mengerjakan agenda RPJMN/RPJMD sekaligus mencapai target SDGs.

Bapak dan Ibu sekalian,

Melalui kegiatan lokalatih, kami berharap pemerintah dan pemerintah daerah dapat duduk bersama menyusun kebijakan yang komprehensif dan sinergis. Isu dapat dirumuskan dengan baik sehingga solusi yang direncanakan melalui program/kegiatan dan anggaran dapat benar-benar dapat menangani permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Demikian Bapak/Ibu sekalian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, atas perhatian dan partisipasinya kami mengucapkan terima kasih.

Selamat Berdiskusi....

Wabillahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 12 September 2018  
Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman  
Tri Dewi Virgiyanti



SAMBUTAN KEPALA BAPPEDA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PADA LOKALATIH SINERGI PENYUSUNAN RPJMN 2020-2024 DAN  
RPJMD TERKAIT PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
*Makassar, 12 September 2018*

---

Bismillahirrahmaanirrahim.

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabharakatuh,

Yth :

- Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI
- Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman
- Para Direktur lingkup Bappenas, Kementerian Dalam Negei, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PU-PR, dan Badan Pusat Statistik (BPS)
- Para Anggota Kelompok Kerja Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi (Pokja PPAS) Nasional
- Para Kepala Bappeda, Dinas DKP, Dinas PU Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten Kota Pilkada serentak di Wilayah Timur Indonesia
- Tenaga Ahli Perumahan dan Kawasan Permukiman (TAPP) Pokja PKP
- Hadirin yang berbahagia

***Hadirin yang kami hormati***

Pada saat yang berbahagia ini tiada kata yang paling mulia diucapkan kecuali memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat hadir mengikuti acara Lokalatih Sinergi Penyusunan RPJMN 2020-2024 dengan RPJMD Bidang Perumahan dan Permukiman. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai panutan dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam pengelola pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang menjaga keseimbangan lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas atas penunjukan Sulawesi Selatan sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan ini.

Pada kesempatan yang berbahagia ini juga kami menyampaikan selamat datang dan ucapan terima kasih kepada bapak, ibu, saudara(i), para peserta Lokalatih Sinergi Penyusunan RPJMN dengan RPJMD, karena kita dapat meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan ini, guna lebih meningkatkan sinergi penyusunan perencanaan pembangunan melalui dokumen RPJMN dengan RPJMD Provinsi dan RPJMD Kab/Kota.

Sulawesi Selatan memiliki luas wilayah 46.083,94 km persegi meliputi 21 kabupaten dan 3 Kota. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dalam 5 tahun terakhir selalu berada diatas 7%, bahkan ketika Provinsi lain mengalami perlambatan ekonomi, Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan ekonominya yang meningkat. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi mencapai 7,23% yang menempati urutan 2 secara nasional. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan nasional yang hanya tumbuh 5,07%. Pendapatan perkapita mencapai Rp 48,2 juta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang semakin membaik dimana pada tahun 2017 sebesar 70,34 dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2018 sebesar 5,39%.

***Hadirin yang kami hormati***

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamatkan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antaruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Secara teknis Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan upaya Pemerintah dalam memberikan panduan bagi seluruh pihak dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan kawasan permukiman. Pendekatan keterpaduan antar sektor dan antar pemerintahan, dibutuhkan kolaborasi dan pendekatan kemitraan, mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, hingga pengendalian.

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, pembangunan perumahan dan permukiman adalah salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

**Hadirin yang kami hormati**

Dengan adanya kegiatan Sinergi penyusunan RPJMN 2020-2024 dan RPJMD bidang Perumahan dan Permukiman diharapkan mampu menyelesaikan masalah pembangunan perumahan tersebut yang dapat menciptakan penyelarasan arah kebijakan, sasaran, indikator kinerja, serta prioritas pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Dengan adanya sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah maka diharapkan : 1) Mengurangi kesenjangan antar wilayah secara lebih terarah dan sistematis dengan skenario yang disepakati dengan semua pihak, 2) Meningkatkan keterkaitan pembangunan antar wilayah dalam rangka memperkuat perekonomian sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

**Hadirin yang kami hormati**

Provinsi Sulawesi Selatan telah menjadikan pembangunan bidang perumahan dan permukiman menjadi prioritas sebagai upaya untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sulawesi Selatan. Adapun capaian kinerja pembangunan di sektor perumahan dan permukiman adalah sebagai berikut:

1. Luas Kawasan Kumuh seluas 1824,23 Ha (Tahun 2017 berdasarkan data Program KOTAKU)
2. Capaian Akses Sanitasi hingga 2017 sebesar 89,17%
3. Capaian Akses Sanitasi Layak tahun 2017 sebesar 76%
4. Penanganan Sampah mencapai 72,93%
5. Pelayanan Air Minum Layak sebesar 73,42% (tahun 2016)
6. Tingkat kebutuhan hunian (Backlog) sebesar 134.953 unit (Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan)

Berdasarkan capaian kinerja tersebut maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2018-2023 (periode Gubernur terpilih) yang memiliki visi **Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter** untuk sektor perumahan dan permukiman menetapkan fokus pembangunan melalui kegiatan:

1. Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air, Waduk, Irigasi, Pengolahan Air Bersih
2. Pengelolaan Persampahan
3. Pembangunan Infrastruktur Jalan sampai desa-desa
4. Penyediaan Air Minum di Pulau-Pulau
5. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

**Hadirin yang kami hormati**

Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman maka melalui kegiatan lokalatit yang dilaksanakan selama empat hari kedepan diharapkan bisa melahirkan sebuah dokumen perencanaan RPJMN yang lebih berkualitas yang dapat menciptakan penyelarasan arah kebijakan, sasaran, indikator, serta kegiatan prioritas pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan lokasi dan target yang jelas, tidak seperti RPJMN dan Renstra Kementerian sebelumnya yang hanya mencantumkan target dan Anggaran tanpa lokasi yang jelas. Penentuan target lokasi yang lebih awal dapat menciptakan sinergitas dan konsistensi perencanaan pembangunan pada setiap level pemerintahan. Sinergisitas perencanaan pembangunan daerah yang dibiayai dari berbagai sumber anggaran menjadi mutlak dilakukan sehingga tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai bisa terwujud, baik antar sektor maupun antar waktu. Sinergisitas pembangunan antar sektor merupakan kesesuaian program pembangunan antar sektor sehingga tidak ada tumpang tindih dalam program pembangunan, tetapi justru saling mendukung. Sedangkan sinergisitas pembangunan antar waktu merupakan keberlangsungan program pembangunan (sustainable development) dari waktu ke waktu yang berkelanjutan hingga tujuan dan sasaran pembangunan tersebut tercapai.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, semoga segala aktifitas kita hari ini sampai selesainya acara mendapat petunjuk serta hidayah dari Allah SWT, untuk dapat menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga masyarakat Indonesia semakin menikmati perumahan dan permukiman yang layak.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr Wb

Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan  
Kepala,

**Drs. H. Jufri Rahman, M. Si**

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 96609191986031003

LAMPIRAN C  
Agenda

Waktu	Kegiatan	Narasumber/Fasilitator
<b>Rabu, 12 September 2018</b>		
12.00-14.00		<b>Registrasi</b>
14.00-14.30	<b>Meyanyikan Lagu Indonesia Raya</b>	
	<b>Pembacaan Doa</b>	
	<b>Sambutan Selamat Datang</b>	<b>Ir. Murad</b> Kabid PKP Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan
	<b>Pembukaan dan Arahan</b>	<b>Tri Dewi Virgiyanti, ST, MEM</b> Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas
14.30-17.00	<p><b>High Level Discussion Sinergi RPJMN dan RPJMD antara Eselon II Pokja PPAS Nasional dan Kepala OPD</b></p> <p><b>Tema Besar:</b> Mengapa masih ada rumah tangga di Indonesia yang menempati perumahan dan permukiman tidak layak dan bagaimana langkah ke depan untuk menyelesaikan masalah tersebut?</p>	<p><b>Moderator:</b> <b>Ir. Dedy Permadi, CES</b> Pejabat Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan, Kementerian PUPR</p> <p><b>Narasumber:</b></p> <p><b>Kementerian PPN/Bappenas</b></p> <p><b>1. Tri Dewi Virgiyanti, ST, MEM</b> Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman Kementerian</p> <p><b>Kementerian Dalam Negeri</b></p> <p><b>2. Nita Rosalin, SE, MA</b> Kasubdit Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dit. Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II</p> <p><b>Kementerian ATR/BPN</b></p> <p><b>3. Ir. Doni Janarto Widiantono, M.Eng, Sc</b> Direktur Konsolidasi Tanah, Ditjen Penataan Agraria</p> <p><b>Kementerian PUPR</b></p> <p><b>4. Ir. Pangihutan Marpaung</b> Fungsional Perencana Utama</p> <p><b>5. Dendy Kurniadi, ST, MT</b> Kepala Seksi Perkotaan Wilayah 2, Direktorat PKP, Ditjen Cipta Karya</p>
<b>Kamis, 13 September 2018</b>		
	<b>Registrasi</b>	
08.30-09.30	<b>Sesi Pelatihan I – Pleno Kebijakan Dasar</b>	
	<b>Bersama Mewujudkan Agenda SDGs</b>	<b>Nurul Wajah Mujahid</b> Kasubdit Perumahan, Dit. Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas
	<b>Berbagi cerita sukses Pembangunan Perumahan dan Permukiman</b>	<p><b>Moderator:</b> <b>Ir. Sutji Mintarti, MT.</b> Kasubdit Kemitraan dan Kelembagaan, Dit. PnP, Kementerian PUPR</p> <p><b>Narasumber:</b></p> <p><b>1. Ir. Encep R. Marsadi</b> Griya Kita-Jawa Barat</p> <p><b>2. Moeh Yani, S.Sos, M.M</b> Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Pemkot Surakarta;</p> <p><b>3. H. Syachril, S.H., M.Si, M.Hi</b> Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan</p>
09.30-10.00	<b>Diskusi</b>	

10.00-12.30	<b>Sesi Pelatihan II– Pleno Penyusunan dan Pemanfaatan Data serta Indikator dalam Penyelenggaraan PKP</b>	<b>Moderator:</b> <b>Mitha Hasti, ST, MT</b> Kasubdit Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian, Dit. Perencanaan Penyediaan Perumahan, Ditjen Penyediaan Perumahan
	Pengantar Penggunaan Kerangka Monitoring dan Evaluasi dalam Perencanaan Pembangunan	<b>Narasumber:</b> <b>1. Heriyadi, S.Sos, M.T., M.Sc</b> Kasubdit Sistem Informasi dan Pelaporan PPEP, Direktorat Sistem dan Pelaporan <b>2.</b> Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas <b>3. Hasnani Rangkuti, Ph.D</b> Kasubdit Kesehatan dan Perumahan, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik
	Data dan Indikator Pembangunan PKP dalam SUSENAS KOR dan Modul Kesehatan dan Perumahan	<b>Narasumber:</b> <b>1. Ira Lubis, S.T., MIDP</b> Fungsional Perencana Subdit Perumahan, Dit. Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman; <b>2. Nur Aisyah Nasution, S.T., M.S</b> Fungsional Perencana Subdit Air Minum, Dit. Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman; <b>3. Aldy Mardikanto, S.T., M. Sc.</b> Fungsional Perencana Subdit Sanitasi, Dit. Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman.
12.30-13.30	<b>Istirahat, Sholat, dan Makan</b>	
13.30-13.50	<b>Pembacaan Sambutan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri</b>	Dibacakan oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri
	<b>Sesi Pelatihan III-Pleno Pengenalan Metode Penyusunan KKL</b>	
13.50-14.30	<b>Pengenalan metode Kerangka Kerja Logis (KKL) untuk penyusunan RPJMD Bidang PKP</b>	<b>Narasumber:</b> <b>Hendra Murtidjaja</b> Tim <i>Central Collaboration Management Unit</i> (CCMU)
	<b>Sesi Pelatihan III– Paralel</b>	
14.30-18.00	<b>Praktik Penyusunan KKL Pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>	<b>Fasilitator Utama:</b> Tim <i>Central Collaboration Management Unit</i> (CCMU)  1. Subari 2. Hendra Murtidjaja 3. Dikdik Herdiana 4. Imanudin 5. Encep R. Marsadi 6. Nurlia R. (Korkot) 7. Didi U. Wijayadi 8. Agus Sudirman 9. Tiara Purba 10. Andi Herni (Korkot) 11. Huseiyn Pasaribu 12. Gustomi 13. Tomy Risqi  Fasilitator Pendukung: 1 orang untuk 1 <i>roundtable</i> (berisi 6 peserta dari 2 kab/kota dan atau provinsi)
18.00-19.30	<b>Istirahat, Sholat, dan Makan</b>	
19.30-21.00	Lanjutan praktik penyusunan KKL	
<b>Jumat, 14 September 2018</b>		
	<b>Registrasi</b>	

09.00-11.30	<b>Presentasi Hasil Penyusunan KKL Pembangunan</b>	Presentasi oleh perwakilan masing-masing kelompok, dipimpin oleh Fasilitator.  <b>Narasumber Penanggap:</b> <b>1. Nurul Wajah Mujahid</b> Kasubdit Perumahan, Dit. Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas <b>2. Agus Sulaeman, ST, MM</b> Kasubdit Standard dan Keterpaduan Perencanaan, Dit. Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR <b>3. Merlina Rubiati, S.Sos, MCP</b>
11.30-14.00	<b>Istirahat, Sholat, dan Makan</b>	
14.00-17.00	<b>Talkshow dengan Eselon II Kementerian PUPR – Strategi Kementerian PUPR dalam mendukung SDGs Goal 11.</b>	<b>Moderator:</b> Ir. Hardi Simamora, MPL  <b>Kementerian PUPR</b> <b>1. Ir. Dwityo Akoro Soeranto, MURP</b> Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan, Ditjen Penyediaan Perumahan; <b>2. Ir. Eko Djoeli Heripoerwanto, MURP</b> Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Ditjen Pembiayaan Perumahan; <b>3. Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman</b> <b>4. Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman</b>
17.00-18.00	<b>Wrap up dan Penutupan</b>	<b>Ir. Dwityo Akoro Soeranto, MURP</b> Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan, Ditjen Penyediaan Perumahan;
<b>Sabtu, 15 September 2018</b>		
<i>Check Out</i>		

## LAMPIRAN D

**Daftar Narasumber**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ir. Doni Janarto Widiyanto, M. Eng, Sc</b> (Direktur Konsolidasi Tanah, Kementerian ATR/BPN)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ir. Dwityo Akoro Soeranto, MURP</b> (Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ir. Eko Djoeli Heripoerwanto, MCP</b> (Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tri Dewi Virgiyanti, ST, MEM</b> (Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Agus Sulaeman, ST, MM</b> (Kasubdit Standard dan Keterpaduan Perencanaan, Ditjen Pembiayaan Perumahan)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hasnani Rangkuti, Ph. D.</b> (Kasubdit Kesehatan dan Perumahan, Dit. Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Heriyadi, S. Sos, M. T, M. Sc.</b> (Kasubdit Sistem Informasi &amp; Pelaporan PEPP, Kementerian PPN/Bappenas)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kusumawhardani, ST, MT</b> (Kasubdit Perencanaan Teknik, Dit. Pengembangan Kawasan Permukiman)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ir. Maryoko Hadi, Dipl. E.Eng, MT.</b> (Kasubdit Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan, Dit. KIP)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nitta Rosalin, SE, MA</b> (Kasubdit Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dit. SUPD II, Kemendagri)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nurul Wajah Mujahid, ST., MPA.</b> (Kasubdit Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dendy Kurniadi, ST., MT</b> (Kepala Seksi Perkotaan Wilayah 2, Direktorat PKP, Ditjen CK, PUPR)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aldy Mardikanto, S.T., M. Sc.</b> (Fungsional Perencana Subdit Sanitasi, Dit. Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ira Lubis, S.T., MIDP</b> (Fungsional Perencana Subdit Perumahan, Dit. Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Merlina Rubiati, S.Sos. MCP</b> (Fungsional Perencana, Kementerian PUPR)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nur Aisyah Nasution, S.T., M.S</b> (Fungsional Perencana Subdit Air Minum, Dit. Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ir. Pangihutan Marpaung</b> (Fungsional Perencana Utama, Kementerian PUPR)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ir. H. A. M. Arifin Iskandar, Msi</b> (Kepala Bidang Infrastruktur, Sumber Daya Alam, dan Pengembangan Wilayah)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Moeh Yani, S.Sos, M.M</b> (Kepala Bidang Kawasan Permukiman)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ir. Encep R. Marsadi</b> (Griya Kita)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>H. Syachril, S.H., M.Si, M. Hi</b> (Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kab. Muara Enim Sumatera Selatan)</li> </ul>

# Daftar Fasilitator dan Co-Fasilitator

## KELAS 1 (GARDENIA)



Subari

## KELAS 2 (ASTER)



Hendra

## KELAS 3 (DAISY)



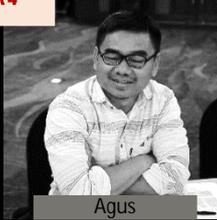
Dikdik

### KELOMPOK 1



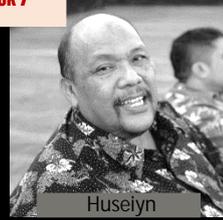
Imanudin

### KELOMPOK 4



Agus

### KELOMPOK 7



Huselyn



Fifi



Amel



Sarwono

### KELOMPOK 2



Encep

### KELOMPOK 5

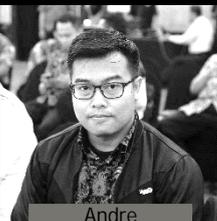


Tiar

### KELOMPOK 8



Gustom



Andre



Ridzki



Tandika

### KELOMPOK 3



Nurlia

### KELOMPOK 6



Ira

### KELOMPOK 9



Tomy



Melda



Putri



Tiara

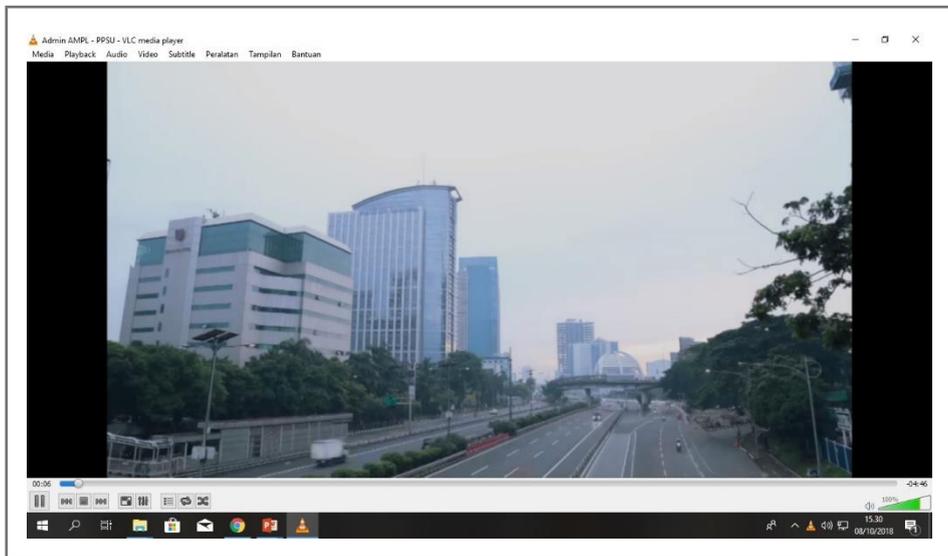
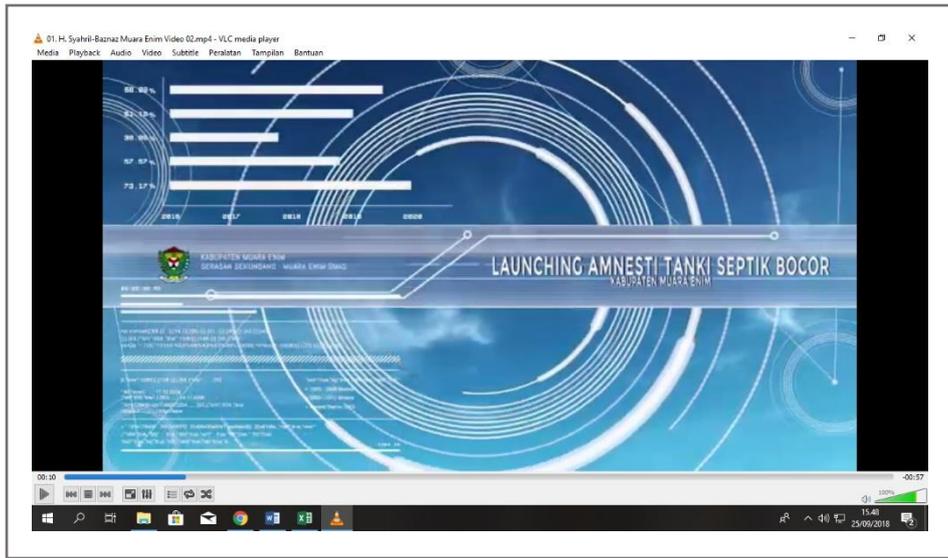
## LAMPIRAN F

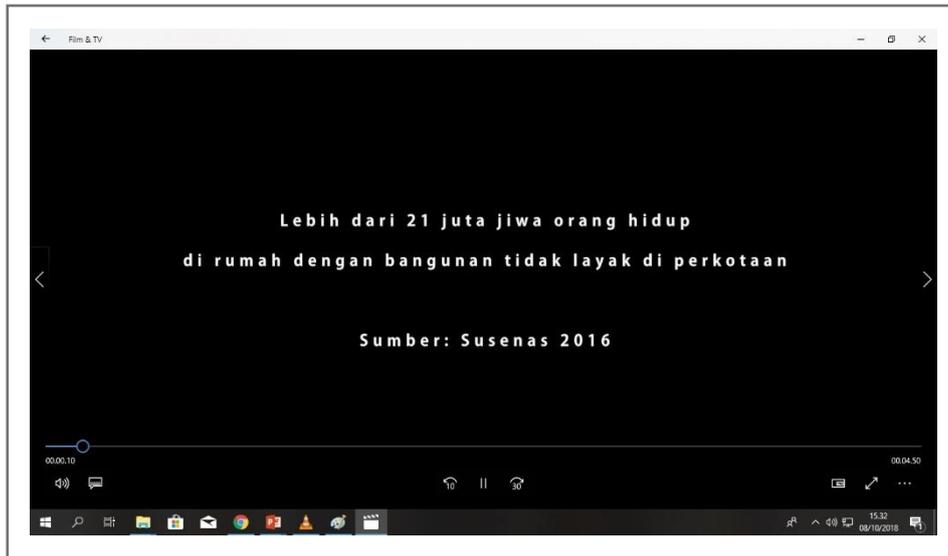
## Daftar Peserta

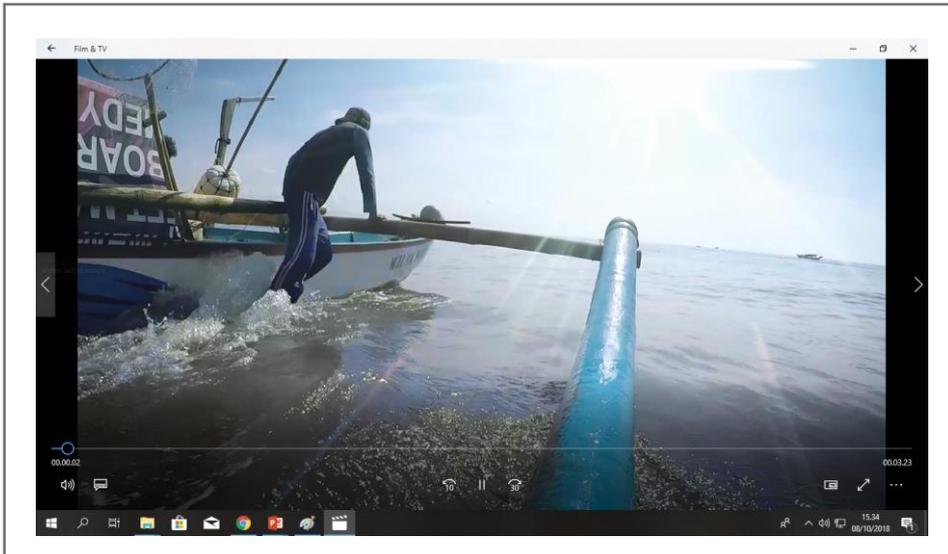
Provinsi / Kabupaten / Kota	Instansi	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	No. Telp.
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	Abdul Murad	Kabid Perumahan	L	08114453424
Kab. Bantaeng	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	Nursyalim	Kabid SDA - LH dan IK	L	08114440534
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	A. Anwar Arifin	Kadis		
		Amiruddin Nur	Kabid	L	081355478912
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	A. Syarifuddin M.	Kadis	L	081342671559
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Fatkur	Kadis	L	
Kab. Bone	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	Muh. Zuhdi	Kabid	L	081342619342
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Khalil	Kadis		
Kota Palopo	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	Firmanza	Ka Bappeda	L	0811421242
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palopo	Nasrul	Kadis PKP	L	082188273018
	Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo	Anthonius D.	Kadis PUPR	L	
		Ramli	Kabid	L	
Kota Pare-Pare	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	Zulkarnaen	Kabid Praswil	L	08124270430
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	H. Gustam Kasim	Kadis	L	
Kab. Pinrang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	Muhammad Idris, SE, M.Si	Kepala Bappeda	L	085255058443
		Ir. H. Arsyad B. M.Si	Kadis	L	085931961140
Kab. Sidenreng Rappang	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Aryani	Kadis	P	082188464909
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan	Abdul Rasyid	Kadis	L	081114168166
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	Harsid Darham	Kadis	L	082112177531
	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	H. M. Nasir	Kadis	L	08114205237
Kota Bau-Bau	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	H. Abdul Rahim	Kadis Bappeda	L	08243941648
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	I. Faridah Samad	Kabid	P	082296616266
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Suarni Kaaba	Kabid PPPU	P	08114384895
Kab. Minahasa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	Christo T.	Kabid Tata Ruang	L	085242725814
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rafafy Moleong	Kadis	L	085240564977
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Silvanus P.T Lumintang	Kabid CK	L	082194060704
Kab. Polewali Mandar	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	Drs. Kailang MM	Kepala Bappeda	L	081342012100
	Dinas Pekerjaan Umum	Hj. Rahmin	Kadis	P	085397461999
Provinsi Maluku	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	Djalaludin Salampessy	Kabid	L	081247247321
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kasrul Selang	Kadis	L	081391061000
Kota Tual	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	Subhan L.	Kabid	L	085217303831
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Fahry R.	Kadis	L	085217564399
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ir. N. Nuadi, MT	Kadis	L	0811393377

Provinsi / Kabupaten / Kota	Instansi	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	No. Telp.
		DW Kusuma Yudho	Kabid Cipta Karya	L	081236108111
<b>Kota Bima</b>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	Jefris	Kabid Infrastruktur	L	
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Hamda	Kadis	L	085237602392
		Muhammad Amin	Kadis	L	
<b>Kab. Lombok Barat</b>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	Luh WY Wiryati	Kabid Litbang Renbang	P	081933130367
<b>Kab. Lombok Timur</b>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	L. A. Ramdhan	Kabid PUPR	L	0887856819521

LAMPIRAN G  
**Video**







## LAMPIRAN H

# Materi Lokalatih

### 1) *Talkshow High Level Discussion*

- Factsheet Pembangunan Perumahan dan Permukiman (<https://drive.google.com/open?id=17oO1wM0oO8DMwM2uCQMaSi2xErmUPhR->)
- Sinergi Penyusunan RPJMN 2020-2024 dengan RPJMD Bidang PKP (<https://drive.google.com/open?id=1YWdRCubEWmIBa48KaCtBg9G8xoQQWArn>)
- Sinergisasi RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (<https://drive.google.com/open?id=11VCajLPeecUvcgvRBaee82JR5mL-Un32>)
- Peran Konsolidasi Tanah dalam Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Perkotaan (<https://drive.google.com/open?id=1QMUqD1mjdZrb98hfZHIOec-8g5OU41YU>)
- Menuju Perumahan dan Kawasan Permukiman Layak Huni di Daerah (<https://drive.google.com/open?id=1BfFoCgtxn0eqIV-bMbjNNj1rwaLwQ00n>)
- Permukiman Kumuh dan Langkah ke Depan untuk Menyelesaikan (<https://drive.google.com/open?id=1bjVgSTdLbPezoTJJT2fxlP0WsBcJan-l>)

### 2) *Kebijakan Dasar Perumahan dan Permukiman*

- Arah Pembangunan Perumahan dan Permukiman “Bersama Mewujudkan Agenda SDGs” (<https://drive.google.com/open?id=11pZaZCPg5yaOzkmiJ4aYeneX7S03kzVh>)

### 3) *Best Practice*

- Praktik Reformasi Perumahan Rakyat di Daerah ([https://drive.google.com/open?id=1Ehp2KY\\_cLKaiwM7nUI1ZncvWg1Cv-2tV](https://drive.google.com/open?id=1Ehp2KY_cLKaiwM7nUI1ZncvWg1Cv-2tV))
- Sinergitas Pembangunan Sanitasi dari Dana Zakat, Infaq, Shadaqah ([https://drive.google.com/open?id=1B6M\\_Ac8HcMFIFLjrMQfkzmaQ0CMWgdWs](https://drive.google.com/open?id=1B6M_Ac8HcMFIFLjrMQfkzmaQ0CMWgdWs))
- Video 1 Muara Enim (<https://drive.google.com/open?id=16Jkn1lpjubDgPydhbjmzGJ4A0j2HoLR>)
- Video 2 Muara Enim ([https://drive.google.com/open?id=15nMcKqAf7H3N\\_8eKOi3pPMssYJRvV3Ep](https://drive.google.com/open?id=15nMcKqAf7H3N_8eKOi3pPMssYJRvV3Ep))
- Profil Kegiatan Rencana Penanganan Kawasan Kumuh TA 2018 Kota Surakarta ([https://drive.google.com/open?id=1AvNPo88ldzMzaE9BYb5PdNln8WBd\\_cAi](https://drive.google.com/open?id=1AvNPo88ldzMzaE9BYb5PdNln8WBd_cAi))
- Profil Kegiatan Penanganan Kumuh Kotaku Kota Surakarta (<https://drive.google.com/open?id=1fNtkAPA-SEUBnj3ldHvFyHWRqIs1xiF>)

### 4) *Data dan Indikator*

- Penggunaan Kerangka Monitoring dan Evaluasi dalam Perencanaan Pembangunan (<https://drive.google.com/open?id=1jim4pH3MmJWv0cp4yozOhEzWM2PSAP0m>)
- Basis Data Perumahan Susenas (<https://drive.google.com/open?id=14H5qOOiul39RQpAf8rbZ27vYTV2VpLWB>)
- Indikator Perumahan dan Permukiman Dalam SDGs (<https://drive.google.com/open?id=1cZGk0RYnwYkyAfpQcOnpWcdDGQwqM1Kr>)

### 5) *Sesi Pelatihan Penyusunan Kerangka Kerja Logis*

- Kelas 1 (<https://drive.google.com/open?id=1UDbWZallrrUVzXEevdcPkE4AxfVrmiBF>)
- Kelas 2 ([https://drive.google.com/open?id=17dtLDLfh-c\\_Jdi-yZGhM\\_DI5-J6WGPCF](https://drive.google.com/open?id=17dtLDLfh-c_Jdi-yZGhM_DI5-J6WGPCF))
- Kelas 3 (<https://drive.google.com/open?id=1grOOQ9wMsxSj406G5NNAyOJmXjHQITsw>)

### 6) *Talkshow dengan Eselon II*

- Rumusan Awal Kebijakan Penyediaan Perumahan tahun 2020-2024 (<https://drive.google.com/open?id=1C4h7Gf-Zsu1FwwYWv9HZGSeMHXm6KQ3z>)
- Strategi Pembiayaan Perumahan Dalam Mendukung SDGs Goal 11 (<https://drive.google.com/open?id=1xf2nLnN9cZ0BGoclLhXsR-y2EkjH5v-9>)
- Strategi Ditjen Cipta Karya dalam Mendukung SDGs Goal 11 (<https://drive.google.com/open?id=1PBAVUimDPAGcSoUPTXcWDuITT6Ukx2Jg>)
- Strategi Kementerian PUPR dalam Mendukung SDGs – 11 (<https://drive.google.com/open?id=1NPGGaWb1B4oc1k1ZSGqOaUzBiwY1cgcw>)

